

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, 2024, *Kabupaten Batang dalam Angka 2024*, (Batang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

Djohermansyah, Djohan. *Problematic Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I (Jakarta, Bumi Aksara, 1990).

Fathoni Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017).

Kusnardi, Muh. dan Haemaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia, 1998).

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020).

Sigit Pramukti, Angger dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

Siswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

2) Jurnal Ilmiah

Epafras, Tuidano et al. Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate.

Jannah, Miftahul, Heryani, Syamsuddin Abdullah, “Peran Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan di Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.5, No.1 (2022).66.

Mahmudah, Fitria, et al. “Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Gorontalo.” *JAMBURA Journal of Architecture*, vol. 4, no. 2, 2022.

Maulana, Akhyar. Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Banda Aceh. 2024.1-10.

Muin, Fatkhul “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah – Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1 (2014).70.

Mulyani Matei, Angela Herman Karamoy, Linda Lambey, “Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol.8, No.1 (2017).

Thahir, B., (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>.

Tuidano, Kaunang, M., & Kimbal, A. (2017). Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate (Studi di Inspektorat Kota Ternate). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16872>

3) Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah dan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

4) Wawancara dan Diskusi

Budi Santosa, S.E. selaku PPUPD Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Batang wawancara pada Rabu, 22 Januari 2025.

Agung Widodo, S.STP, M.Si selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, wawancara pada Rabu, 22 Januari 2025.

5) Situs Internet

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang, <https://bappelitbang.batangkab.go.id/?p=1&id=2>

Kabupaten Batang, Pemerintahan. “Mengenal Batang : Geografis | Website Pemerintah Kabupaten Batang.” [Profil.batangkab.go.id](https://profil.batangkab.go.id), 2024, profil.batangkab.go.id/?p=2&id=2. Diakses pada tanggal 12 Januari 2025.

LAMPIRAN

- Surat Permohonan Riset Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antokus Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 79918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pro-ef: fh@fh.undip.ac.id

Nomor : 734/UN7.F1/AK/XII/2024
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

19 DEC 2024

Yth. Inspektur Kabupaten Batang
Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 11, Sambongpos, Sambong, Kecamatan Batang
Kota Batang, Jawa Tengah, 51212

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Sabrina Azzahra
NIM : 11000121140642
alamat : Jl. Lumbungsari IV Blok A No.30, Semarang
nomor HP : 081390066705
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : "Implementasi Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pengawasan Terhadap Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Batang"

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

- Surat Keterangan Telah Dilaksanakannya Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan RA. Kartini Nomor 1 Batang Jawa Tengah 51215, Telp./Faks. (0285) 391131/392131

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/025/2025

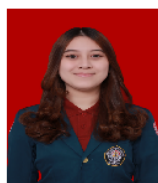
- I. DASAR : a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
b) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- II. MEMPERHATIKAN : Surat dari UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor 734/UN7.F1/AK/XII/2024 Tanggal: 19 Desember 2024 Hal Ijin Penelitian
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **SABRINA AZZAHRA**
 2. Asal Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Fakultas : **Hukum**
Jurusan/Prodi : **Hukum**
 3. Alamat Rumah : **Jl. Lumbung Sari IV Blok A-30, Kalicari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50198**
 4. Pembimbing : **Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**
 5. Judul Penelitian : **"Implementasi Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pengawasan Terhadap Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Batang."**
 6. Lokasi Penelitian : **Inspektorat Daerah**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah;
- b. Sebelum melaksanakan penelitian kepada responden/ masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penanggung jawab/ pimpinan setempat;
- c. Setelah penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.

IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 22 Januari 2025 – 22 Januari 2025.

Dikeluarkan di Batang
pada tanggal 24 Desember 2024



a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BATANG
Sekretaris,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. BAGUS PAMBUDI, S.Sos., MAP., MIDS.

Pembina

NIP. 19820224 200502 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth

1. Pj. Bupati Batang, sebagai laporan;
2. Kepala Inspektorat Daerah;
3. Kepala



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Verifikasi keaslian surat dapat dilakukan dengan cara scan QR code disamping atau menggunakan aplikasi Very DS.